



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD RUSDIANSYAH
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI
3. NHK : 709998

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 8.373.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/330 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 3.400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/165 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/516 m2 di KOTA SURABAYA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.973.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 177.500.000

1. MOBIL, NISSAN LIVINA XV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11CF1C AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ GE8 1.5S Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.096.850.118**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 9.648.150.118**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 9.648.150.118

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.